

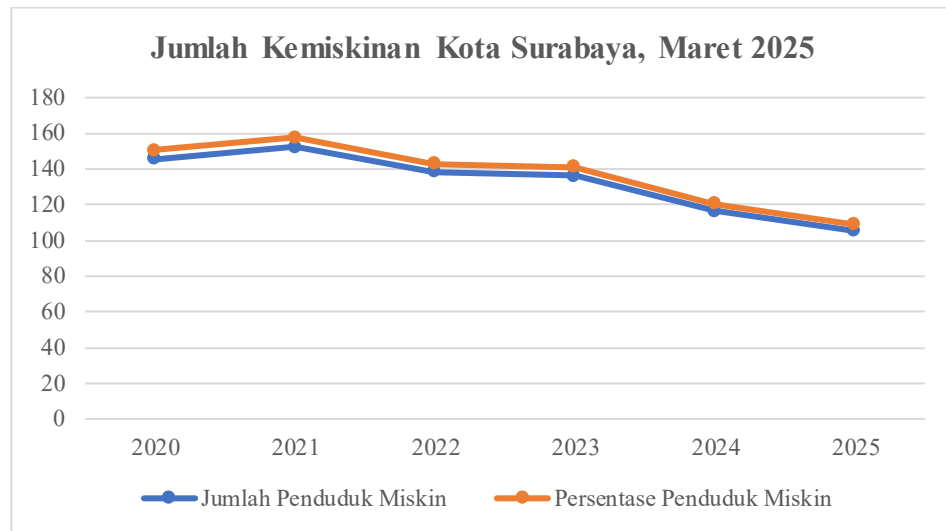
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Badan Pusat Statistik (2025) persentase penduduk miskin pada di Indonesia pada Maret 2025 menurun 0,10% terhadap September 2024 menjadi 8,47%, yang berarti pada tahun 2024 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24,054 juta jiwa menjadi 23,85 juta jiwa. Namun, di perkotaan jumlah penduduk miskin justru naik 220 ribu orang (dari 11,05 juta menjadi 11,27 juta), sementara di pedesaan turun. BPS menjelaskan bahwa adanya kenaikan jumlah kemiskinan di perkotaan dipengaruhi oleh naiknya jumlah pengangguran, kenaikan pengangguran terbuka pada laki-laki dan kenaikan harga pangan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat besar bagi Indonesia. Pada tingkat provinsi, Jawa Timur menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Per Maret 2025, BPS Provinsi Jawa Timur (2025) menunjukkan penduduk miskin di provinsi ini tercatat 9,50% atau sekitar 3,876 juta jiwa. Penurunan tersebut hanya sebesar 0,06 poin dibanding periode sebelumnya, menandakan bahwa pengurangan kemiskinan di Jawa Timur berlangsung lambat dan tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Jawa Timur menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan nasional karena memiliki populasi yang sangat miskin.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia sekaligus kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, karena menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan (Sutanti, 2020). Kota Surabaya juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada tahun 2024, ekonomi Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,76%, hal ini membuat Kota Surabaya menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS Kota Surabaya (2024), beberapa industri penting, seperti perdagangan besar dan eceran, perbaikan kendaraan, industri pengolahan, akomodasi, dan jasa makan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Selain itu, konsumsi dari masyarakat juga sangat besar, mencapai 60,24% dari total PDRB, yang menunjukkan bahwa aktivitas belanja warga sangat mendukung kemajuan ekonomi kota tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 84,69 yang menjadikan kota dengan IPM tertinggi di Jawa Timur dan masuk dalam kategori sangat baik, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya. Meskipun Kota Surabaya menjadi kota dengan IPM tertinggi di Jawa Timur, kemiskinan masih menjadi kendala utama dan masalah nyata. Berdasarkan BPS Kota Surabaya (2025) tingkat kemiskinan di Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,56% menurun dibandingkan 3,96% pada tahun 2024. Jika dilihat dalam rentang waktu yang lebih luas, data dari Pemerintah Kota menyebut bahwa pada 2021 Surabaya memiliki angka kemiskinan sebesar 5,23 %, kemudian turun ke 4,72 % pada 2022, 4,65 % pada 2023, lalu ke level 3,96 % pada 2024, dan menurun 3,56% pada Maret 2025.



**Gambar 1. 1. Jumlah Kemiskinan Kota Surabaya, Maret 2025**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2025

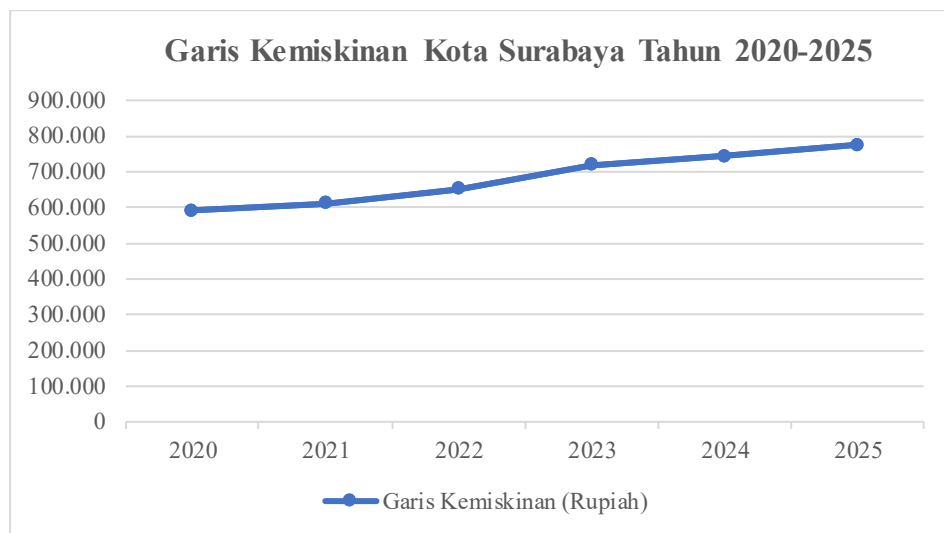
Berdasarkan data di atas masih banyaknya jumlah kemiskinan di Kota Surabaya. Menurut Sekretaris Pansus LKPJ, Ajeng Wira Wati, permasalahan belum selesai, sebab masih ada 100 ribu jiwa yang perlu disorot untuk disejahterakan karna angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Seperti pada berita cahayabaru.id

cahayabaru.id - Sekretaris Pansus LKPJ, Ajeng Wira Wati, menyatakan bahwa klaim resmi mengenai angka kemiskinan ekstrem di Surabaya yang mencapai nol persen belum mencerminkan kondisi nyata. Ia menekankan bahwa di banyak wilayah kota masih terdapat warga miskin yang tidak tercatat secara administratif dan tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana seharusnya. “Yang kami lihat di lapangan tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan. Banyak warga miskin yang tidak masuk data, karena kurangnya edukasi dan lemahnya sistem pendataan,” ujar Ajeng usai rapat.

Sumber : (<https://cahayabaru.id/2025/04/15/dprd-surabaya-desak-sinkronisasi-data-kemiskinan/>) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

Berdasarkan berita di atas masih ada kendala meskipun Kota Surabaya mengalami penurunan angka kemiskinan seperti yang dikatakan oleh DPRD

Surabaya yang mengatakan meskipun data resmi menyebutkan kemiskinan ekstrem sudah nol persen, banyak di wilayah kota masih ditemukan keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial.



**Gambar 1. 2. Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2020-2025**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2025

Garis kemiskinan Kota Surabaya dari tahun 2020 hingga 2024 juga menunjukkan tren naik. Menurut Pemerintah Kota Surabaya (2025) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029, kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, meningkatnya standar hidup masyarakat, serta perubahan dalam pola konsumsi. Kondisi ini menimbulkan fenomena yang disebut kemiskinan relatif, yaitu situasi di mana meskipun jumlah penduduk miskin menurun, kenaikan garis kemiskinan menandakan bahwa kelompok rentan masih menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, sebagian masyarakat mungkin sudah

keluar dari kategori miskin, namun masih berada dalam posisi “hampir miskin” dan berpotensi kembali jatuh ke jurang kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi.

Berdasarkan dari dua data terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan di atas dapat kita simpulkan bahwa Kota Surabaya masih menghadapi banyak masalah dalam menangani kemiskinan. Keadaan kemiskinan ini menjadi penghalang besar dalam upaya untuk memastikan akses pendidikan yang sama bagi semua anak, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Menurut Baidah et al., (2025) masalah pendidikan bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah mikro dan makro. Masalah mikro berasal dari bagian dalam sistem pendidikan itu sendiri, contohnya dalam perancangan kurikulum. Pada sisi lain, masalah makro berkaitan dengan persoalan yang timbul karena hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial yang lebih luas, seperti perbedaan akses pendidikan antar wilayah.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan diatur. Undang-undang ini mengatur standar pendidikan nasional, hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pendidikan, peran pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun di tingkat Kota Surabaya, dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan dipikul bersama

oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Peraturan ini juga menjadi landasan bagi berbagai kebijakan teknis seperti penerimaan peserta didik baru, pendidikan inklusif, serta pengembangan sekolah ramah anak guna mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa dana untuk pendidikan harus setidaknya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Sujanto, 2021).

Menurut Maharani et al., (2024) kemiskinan terus menjadi faktor utama yang menghambat anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak, menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan pendidikan umum bagi semua anak. Anak-anak dari keluarga miskin kerap mengalami beragam kendala dalam mengakses pendidikan, seperti biaya sekolah, pembelian seragam, buku, serta berbagai pengeluaran lainnya. Selain itu, kemiskinan juga menimbulkan dampak psikologis yang dapat menurunkan motivasi serta prestasi belajar anak. Kondisi ini membentuk lingkaran kemiskinan yang terus berulang, di mana keterbatasan akses terhadap pendidikan diwariskan antar generasi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengesampingkan pendidikan, sehingga tidak sedikit individu yang berhenti sekolah akibat tekanan ekonomi. Anak-anak yang seharusnya pergi ke sekolah akhirnya memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi prioritas bagi mereka.

Akibatnya, banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan sekolah (Munawar et al., 2024).

Kondisi kemiskinan di Indonesia, Jawa Timur, dan Kota Surabaya berdampak pada sektor pendidikan ditandai dengan masih banyak dijumpai anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi di keluarganya. Laporan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 76% keluarga menyatakan bahwa alasan ekonomi menyebabkan anak mereka putus sekolah. Sebagian besar, 67,0%, mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan, sementara 8,7% lainnya harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Untuk mengurangi kemiskinan, pendidikan sangat penting. Namun, keluarga yang tidak memiliki cukup uang sering kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik. Hal ini bisa terjadi karena biaya yang terlalu mahal, fasilitas yang tidak memadai, atau karena anak-anak harus membantu bekerja untuk mendukung keluarga (Haq et al., 2025). Salah satu penyebab utama kurang berkembangnya dunia pendidikan adalah persoalan kemiskinan yang membuat masyarakat sulit menjangkaunya. Kemiskinan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan sosial, karena kondisi ekonomi yang rendah membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan (Jumanah & Rosita, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2025) berdasarkan wilayah individu peserta didik jumlah angka putus sekolah di Indonesia sebesar 4.191.985 siswa. Sementara itu untuk Provinsi Jawa Timur angka putus sekolah sebesar 375.851 siswa. Angka tersebut mencatat

bahwa Jawa Timur penyumbang no 2 angka putus sekolah di Indonesia. Pada data tersebut dapat menggambarkan masih terdapat kesenjangan dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia dan di Surabaya

**Tabel 1. 1. Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bulan September 2025**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah DO dan LTM
1	Kabupaten Malang	24.431
2	Kabupaten Jember	24.064
3	Kabupaten Bangkalan	17.223
4	Kabupaten Pasuruan	17.205
<b>5</b>	<b>Kota Surabaya</b>	<b>15.139</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025

**Tabel 1. 2. Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Provinsi Jawa Timur Bulan September 2025**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah DO dan LTM
1	Kabupaten Jember	38.036
2	Kabupaten Bangkalan	29.586
3	Kabupaten Malang	29.162
4	Kabupaten Sampang	28.294
<b>5</b>	<b>Kota Surabaya</b>	<b>23.564</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025

Data di atas menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Jawa Timur masih memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi. Dengan jumlah angka LTM dan DO

tertinggi di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya berada di peringkat ke-5. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang melanda mereka sehingga tidak melanjutkan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024 yakni 12.517 siswa LTM dan DO. Tingginya angka anak tidak sekolah di kota besar seperti Surabaya juga menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan dan tuntutan ekonomi keluarga masih menjadi hambatan. Menurut data dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) Surabaya merupakan kota dengan jumlah APBD terbesar se-Indonesia dengan jumlah 11,36 T disusul oleh Kabupaten Bogor sebesar 9,43 T, dan Kota Medan sebesar 7.86 T. Meskipun Surabaya memiliki jumlah APBD yang cukup besar masih memiliki permasalahan dalam angka putus sekolah yang tinggi. Selain itu, Kota Surabaya juga dikenal dengan kota pendidikan, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi (Indahri, 2017). Salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertinggi adalah Surabaya. Data berikut menunjukkan jumlah PTN dan PTS yang ada di Jawa Timur:

**Tabel 1. 3. Jumlah PTN dan PTS di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Perguruan Tinggi Negeri (PTN)</b>	<b>Perguruan Tinggi Swasta (PTS)</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Surabaya</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>70</b>

No	Kota/Kabupaten	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	Jumlah
2	Malang	3	49	52
3	Jember	2	18	20
4	Kediri	-	16	16
5	Banyuwangi	1	12	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2024

Data menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbanyak. Ini menunjukkan bahwa Surabaya telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik, di mana angka putus sekolah di Kota Surabaya masih tergolong tinggi. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan masyarakat untuk mengakses banyak lembaga pendidikan dan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua orang, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak sarana pendidikan, tidak semua orang memiliki akses pendidikan yang sama. Ayuningtyas (2021) menjelaskan bahwa perbedaan kondisi ekonomi dan wilayah tempat tinggal keluarga merupakan faktor yang secara nyata memengaruhi kesempatan anak dalam mengakses jenjang pendidikan menengah hingga tinggi. Satu daerah yang terdampak kemiskinan yang berdampak pada akses pendidikan

berada pada pesisir pantai Kenjeran Surabaya. Seperti pada penelitian yang ditulis oleh (Nisa, 2024) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan minat belajar yang rendah di Kecamatan Sukolilo tepatnya di Pesisir Pantai Kenjeran dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan keluarga karena anak sering membantu orang tua dan terlibat dalam pekerjaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini karena mata pencaharian utamanya berkaitan dengan laut, seperti menjadi nelayan atau buruh laut, dan sebagainya. Selain itu, kendala biaya serta minimnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan menjadi faktor yang membuat anak-anak kurang berminat untuk belajar.

Selama proses pembangunan Kota Surabaya, dua masalah utama yang saling berhubungan adalah kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya harus bekerja sama dengan terencana untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Menurut Yunus (2024) Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Selain itu, pemerintah memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang mendukung kesetaraan pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar investasi di sektor pendidikan, baik melalui peningkatan fasilitas dan infrastruktur, maupun pengembangan kompetensi guru serta tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah harus memperluas pemerataan akses ke pendidikan dan memberikan bantuan biaya kepada warga berpenghasilan rendah untuk memberi mereka kesempatan untuk

masuk ke universitas yang lebih baik. Sarana prasarana adalah bagian dari manajemen pendidikan yang harus diperhatikan, karena dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sarana prasarana berperan penting dalam mendukung sekolah dalam membantu guru menyampaikan materi pelajaran serta mendukung kelancaran proses pembelajaran, sehingga sasaran pendidikan yang diinginkan dapat terwujud (Istiana Putri et al., 2024). Metode ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kualitas pendidikan rendah di Surabaya yang akan memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional berlangsung dengan lebih efisien.

Pemerintah telah mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan pendidikan formal seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), dukungan seragam dan buku, BOSDA sebagai tambahan dari BOS pemerintah pusat, dan program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk siswa Surabaya yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat. Menurut Pasal 4 Perwali 135 Tahun 2022, calon penerima Beasiswa Pemuda Tangguh harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain adalah telah diterima di institusi pendidikan yang relevan, berada dalam kondisi sehat, serta berdomisili di Surabaya yang harus dibuktikan dengan KTP atau KK (Dwi & Isbandono, 2024). Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya juga pernah membuat program yang bernama Sekolah Kebangsaan yang bekerja sama dengan TNI AL melalui Pangkalan Angkatan Laut (Lanudal) Juanda. Program tersebut bertujuan untuk membina dan membentuk karakter anak-anak yang bermasalah, seperti pelaku tawuran, balapan liar, hingga

penyalahgunaan zat. Melalui pelatihan yang intensif selama 10 hari di Juanda, program ini berhasil menunjukkan hasil positif dengan perubahan perilaku yang signifikan kepada para peserta. Namun, perubahan perilaku tersebut tidak berlangsung lama, dalam beberapa bulan, anak-anak yang sama kembali terjaring dan melakukan pelanggaran serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% penyebab utama perilaku menyimpang anak berasal dari elemen keluarga seperti perceraian, orang tua yang bekerja jauh dari rumah, atau anak yang dititipkan kepada saudara. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya:

swaraneews.com - “Setelah evaluasi, ditemukan bahwa 90% masalah perilaku anak berasal dari faktor keluarga, seperti perceraian orang tua, ayah yang bekerja di luar kota, atau anak yang dititipkan kepada kerabat,” kata Wali Kota Eri

Sumber : (<https://swaraneews.com/amp/news-8709-dari-sekolah-kebangsaan-hingga-digitalisasi-wali-kota-eri-beberkan-rahasia-kemajuan-surabaya-di-unair>) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

Menanggapi permasalahan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadirkan inovasi melalui pendirian Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) sebagai wadah pembinaan dan pendidikan jangka panjang. Program ini merupakan program turunan dari UPTD Kampung Anak Negeri yang sebelumnya membina anak jalanan dan anak dengan masalah kesejahteraan sosial. Program tersebut berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Peraturan ini berisi pemberian pembinaan, pelayanan, dan pengembangan potensi

bagi tuna grahita, mahasiswa asuh, serta anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak dari Keluarga Tidak Mampu. Peraturan ini berisi ketentuan mengenai pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, yaitu satuan pendidikan dengan sistem asrama dan penguatan karakter yang memberikan layanan pendidikan formal pada tingkat dasar dan/atau menengah secara terpadu bagi siswa dari keluarga yang sangat miskin, miskin, atau rentan. RIAS dikembangkan sebagai solusi alternatif menggantikan Sekolah Rakyat, karena keterbatasan lahan di Surabaya yang hanya tersedia seluas 4 hektar, sementara syarat pendirian Sekolah Rakyat memerlukan minimal 7 hektar. RIAS berfungsi memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu memiliki akses yang sama ke pendidikan melalui sistem asrama yang menekankan pembangunan karakter, pengembangan keterampilan, dan pengembangan kemandirian. Kehadiran program ini menjadi langkah inovatif Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial masyarakat.

RIAS merupakan program berbasis asrama yang menyediakan bimbingan belajar dan pengembangan keterampilan tanpa biaya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tujuan program ini adalah memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui penyediaan asrama pendidikan gratis, pendampingan akademik, serta pembinaan karakter dan pengembangan soft skill agar mencetak generasi muda yang mandiri,

berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Program ini dilaksanakan dengan mengusung konsep “Satu Keluarga, Satu Sarjana” sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan. Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dimulai pada 24 Juli tahun 2025 dan saat ini menerima 84 siswa dari berbagai tingkat pendidikan di Kota Surabaya, mulai dari Sekolah Dasar (kelas I hingga kelas VI) hingga Sekolah Menengah Pertama (kelas VII hingga kelas IX) (Widiyana, 2025). Namun, hingga saat ini RIAS masih memiliki kendala dalam jumlah asrama, saat ini RIAS hanya memiliki 1 asrama dan sudah penuh, hal ini merupakan suatu kendala dikarenakan jumlah asrama tidak sebanding dengan jumlah anak dari keluarga kurang mampu di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan pembangunan 3 asrama terkhususnya asrama bagi perempuan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara daya tampung fasilitas RIAS dan kebutuhan penerima manfaat (Elaine, 2025). Keterbatasan tersebut berpotensi membatasi jangkauan program dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut sebagai dasar penguatan dan pengembangan program kedepan.

Berbeda dengan UPTD Kampung Anak Negeri yang membina dan menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta anak yang bermasalah sosial seperti anak jalanan, terlantar, dan rentan. Program RIAS didedikasikan untuk anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ini dikonfirmasi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menempati

asrama tersebut, seperti disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada [jatim.jpnn.com](http://jatim.jpnn.com)

[jatim.jpnn.com](http://jatim.jpnn.com) - Eri memastikan RIAS hanya diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. Pihaknya akan mengecek dan menyaring siapa saja masyarakat yang berhak ada di tempat tersebut. "Jadi, kalau tempat ini adalah dari keluarga-keluarga yang memang betul-betul tidak mampu di Kota Surabaya," tutur dia.

Sumber : (<https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/38533/rias-jadi-solusi-gantikan-sekolah-rakyat-di-kota-surabaya?page=2>) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

Penelitian terdahulu menunjukkan beragam hasil terkait efektivitas lembaga pendidikan nonformal. Penelitian yang dilakukan oleh Afrilianti & Khotami (2024) pada program PKBM Baitul Fajar di Kelurahan Sialang Sakti, Kota Pekanbaru terbukti efektif dalam mengatasi anak putus sekolah melalui ketepatan sasaran, sosialisasi yang baik, dan pemantauan rutin. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya motivasi belajar, perbedaan kemampuan peserta, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Penelitian serupa oleh Karnain & Isa (2023) pada program kesetaraan Paket C di SKB Tolangohula, Kabupaten Gorontalo belum berjalan optimal karena perencanaan dan pelaksanaannya kurang sistematis, serta terbatasnya sarana dan tenaga pendidik. Meskipun penilaian sudah sesuai ketentuan, hasil belajar peserta masih rendah. Sementara itu, Fismanelly et al., (2022) di PKBM Permata Bunda di Kabupaten Solok Selatan dinilai efektif dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Keberhasilannya didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang fleksibel, serta sarana prasarana yang memadai. Namun, keterbatasan dana dan rendahnya motivasi belajar warga

masih menjadi kendala utama. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada wilayah pedesaan atau kabupaten, dan belum banyak yang meneliti konteks perkotaan besar seperti Surabaya yang memiliki karakter sosial dan ekonomi berbeda.

Berbagai penelitian sebelumnya belum ada yang secara mendalam dan menyeluruh mengkaji bagaimana Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dijalankan serta berperan bagi anak dari keluarga kurang mampu di lingkungan perkotaan. Padahal, analisis berbasis konteks sangat penting untuk memahami dinamika implementasi program pendidikan nonformal bagi anak dari keluarga kurang mampu di kota besar seperti Surabaya yang memiliki jumlah PTN dan PTS terbanyak di Jawa Timur dan kota yang memiliki APBD terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada RIAS Surabaya. Dengan menggali pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, pengelola, dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas program RIAS sebagai model pendidikan nonformal di kota besar dengan karakter sosial yang beragam dan tantangan kemiskinan yang masih ada. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Streers, 1985). Teori ini menjelaskan ada 3 ukuran mengenai efektivitas suatu program yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk

mengambil judul **“Efektivitas Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (Rias) Bagi Anak Dari Keluarga Kurang Mampu di Dinas Sosial Kota Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan menjadi: “Bagaimana efektivitas Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) bagi anak dari keluarga kurang mampu di Dinas Sosial Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) bagi anak dari keluarga kurang mampu di Dinas Sosial Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang administrasi publik dan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai efektivitas program pendidikan non-formal seperti Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dalam mendukung peningkatan akses belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu di Dinas Sosial Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait pelaksanaan program berbasis komunitas dalam mengatasi ketimpangan

akses pendidikan serta menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang meneliti hubungan antara kemiskinan, akses pendidikan, dan efektivitas kebijakan publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian serta manfaat teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai wadah untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan di ruang baca Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain yang ingin mempelajari subjek serupa di masa mendatang.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan pelajar administrasi publik. Studi ini meningkatkan pemahaman mereka tentang seberapa efektif Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) bagi anak-anak dari Keluarga Kurang Mampu di Dinas Sosial Kota Surabaya.